

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu institusi penting dalam suatu negara hukum sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikatakan didalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 pasal 2 bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian jegara Republik Indonesia dalam pasal 1 dikatakan bahwa ” Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri”.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri terbagi menjadi lima fungsi teknis kepolisian, yaitu fungsi Intelkam, fungsi reskrim, fungsi sabhara, fungsi lintas, dan fungsi bimmas. Fungsi Sabhara pada ruang lingkup Kepolisian Polda Metro Jaya disebut dengan Direktorat Sabhara. Pada Direktorat Sabhara terdapat Subdit Dalmas yang memiliki fungsi menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa sebagai tindakan preventif kepolisian. Tugas ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Menurut Djatmika (2006) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, seorang polisi harus mampu menahan perasaannya, sanggup menahan egonya, sehingga orang yang dilayani merasa senang, puas, dan merasa dihormati. Sebagaimana diatur dalam UU RI no 9 tahun 1998 tentang kebebasan penyampaian pendapat dimuka umum, dimana memerlukan pengamanan dan pengawalan dari kepolisian, khususnya dalmas. Fungsi Pengendalian massa (dalmas) adalah suatu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan

pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum guna mencegah masuknya pengaruh pihak tertentu atau provokator (Edi Sunarno, 2008).

Salah satu gangguan kamtibmas yang menjadi fokus perhatian POLRI saat ini, adalah bagaimana menangani kejahatan atau gangguan kamtibmas yang dilakukan secara massal. Kejahatan dengan melibatkan pelaku dalam jumlah yang sangat besar sampai mencapai ribuan seperti unjuk rasa, penjarahan massal, rusuh massal, perkelahian antar kelompok, pembalakan liar, penambangan liar, isu sara, eksekusi obyek sengketa, pengusuran pemukiman liar, pembunuhan dukun santet dan sebagainya. Mengapa demikian, karena gangguan keamanan seperti tersebut diatas mempunyai spektrum ancaman faktual dan dampak sosial yang sangat luas, juga dapat mengganggu stabilitas keamanan dan merongrong kewibawaan negara, serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional karena investor asing takut menanamkan modalnya di negara yang keamanannya tidak terjamin. (Mudhar, 2012)

Polda Metro Jaya memiliki wilayah hukum di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta bukanlah sekedar sebagai pusat pemerintahan ibukota negara Republik Indonesia. Jakarta juga berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat investasi, pusat industri, pusat pariwisata, pusat hiburan dan sekaligus pusat segala aktivitas ekonomi lainnya. Posisi yang sangat strategis ini membuat kota Jakarta menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Jakarta juga merupakan salah satu faktor pemicu perkembangan wilayah di sekitarnya. Kawasan yang semula hanya sebuah kota Kecamatan berkembang menjadi kota satelit yang berfungsi sebagai penyangga Jakarta. Ada tujuh wilayah penyangga yang mengelilingi Jakarta dan menjadi bagian wilayah hukum Polda Metropolitan Jakarta yaitu Kodya Tangerang, Kabupaten Tangerang Banten, Kodya Depok, Kodya Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Setiap hari penduduk wilayah penyangga melakukan aktifitas di Jakarta. Sedangkan wilayah yang termasuk wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Humas PMJ, 2010).

Jakarta sebagai pusat pemerintahan menjadikan Jakarta sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi dari penduduk Jakarta maupun luar Jakarta kepada pemerintah atau instansi yang dituju secara langsung. Istana Negara, DPR/MPR RI, kantor pemerintahan dan pusat-pusat bisnis yang berada di Jakarta menjadi tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah untuk langsung ke pemerintah pusat. Jumlah yang besar dan sifat unjuk rasa yang bervariasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan eskalasi unjukrasa mengarah ke arah anarkhi. Jumlah yang besar akan sulit untuk mengatur dan mengendalikan massa agar dapat diarahkan untuk berjalan tertib dan aman. Sifat unjukrasa yang bervariasi dari yang hanya menyampaikan aspirasi dengan pengeras suara, pembakaran ban atau spanduk, treatrikal hingga pelemparan-pelemparan benda-benda berbahaya dapat menimbulkan efek bagi satu sama lain pengunjung rasa dari berbagai kelompok yang berbeda.

Tugas pasukan dalmas di lapangan adalah menjaga, melokalisir dan menghalau massa agar tetap berkumpul di suatu tempat dan kemudian membubarkannya. Pada umumnya konsentrasi massa yang sedang dihadapi adalah merupakan massa yang tidak puas, massa yang frustrasi, massa yang sedang mengajukan suatu tuntutan dan massa yang sedang marah. Apabila massa yang sedang marah tersebut kemudian terhalangi kehendaknya, sesuai dengan sifat-sifat massa yang dinamis, sensitif, destruktif, mudah berubah dan emosional, maka ada kecenderungan massa untuk melakukan tindakan agresi dan provokasi terhadap pasukan dalmas yang dianggapnya sebagai penghalang aspirasi dan tuntutannya (Mudhar, 2012)

Pekerjaan polisi merupakan pekerjaan yang tidak bisa diprediksi serta tidak memiliki batas waktu yang jelas. Setiap masyarakat membutuhkan bantuan polisi, polisi harus siap. Orang-orang yang dihadapi polisipun berasal dari berbagai golongan dengan status dan kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan-kepentingan golongan dalam masyarakat sering kali saling berbenturan (Raharjo, 2002). Perbedaan kepentingan ini menjadi suatu dilema bagi anggota kepolisian, dimana satu pihak merasa diuntungkan dengan kehadiran polisi, dan pihak yang lain merasa dirugikan.

Pihak yang merasa dirugikan inilah yang terkadang bersikap agresif terhadap anggota polisi dalmas di lapangan.

Provokasi dan agresi massa terhadap pasukan dalmas di lapangan dapat berupa ejekan, caci maki dengan kata-kata kotor hingga berbentuk agresi fisik. Seperti mendorong dan mendesak pasukan dengan kekuatan massa, pelemparan batu, pelemparan telur busuk atau tomat busuk dan kotoran manusia, pelemparan bom molotov (bondet), merusak barikade dan kendaraan petugas, membakar ban bekas, melakukan pemukulan dengan benda tajam dan benda benda keras lainnya. Seperti kasus yang terjadi di Tanjung Priok, 14 April 2010 dimana massa dan polisi menjadi korban. Jumlah korban yang mengalami luka-luka mencapai 107 orang. Data yang dikeluarkan RSUD Koja itu membeberkan, jumlah korban luka massa, aparat Satpol PP dan polisi (vivanews.com 14/4/2010). Dengan jumlah yang tidak seimbang, agresivitas massa terhadap polisi yang melaksanakan pengamanan pengusutan makam mbah priok, menimbulkan perilaku agresif anggota polisi khususnya dalmas. Agresi tersebut berakibat terjadinya korban luka berat dan ringan, bahkan yang fatal dapat menimbulkan kematian pada pasukan dalmas sebagaimana yang telah dicontohkan diatas. Disamping dapat berakibat secara fisik, agresi massa juga dapat berakibat secara psikologis kepada pasukan dalmas, seperti rasa takut, stress, cemas dan traumatis. Karena harus menanggung provokasi dan agresi secara terus menerus di lapangan, pasukan dalmas disamping harus dilatih secara khusus dan profesional juga dituntut mempunyai stabilitas emosi yang mantap, mempunyai ketegasan dan keberanian yang terarah, sabar, mempunyai kualitas fisik dan psikhis yang prima serta mempunyai mental kepribadian yang menarik.

Provokasi yang dilakukan pasukan dalmas terhadap massa adalah merupakan respon balik terhadap perilaku massa yang sebelumnya telah melakukan provokasi dan agresi, sehingga peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah merupakan kontra agresi antara massa dengan pasukan dalmas. Agresi merupakan tindakan individu yang diarahkan pada penghalang dalam pencapaian kepuasan, menurut Krench, Crutchfield, dan Ballachey (dalam

Rusli Ibrahim, 2001). Moore Fine (Kartono, 2000) mengatakan bahwa agresif adalah tingkah laku kekerasan secara fisik atau verbal terhadap orang lain atau objek lain.

Agresi yang dilakukan pasukan dalmas terhadap massa dapat berupa ejekan, caci maki dan teriakan-teriakan dengan suara keras sebagai luapan ekspresi kemarahan, dorongan dengan tameng dalmas, pemukulan dengan tangan kosong dan tongkat dalmas, penggunaan kendaraan taktis (rantis), kendaraan penyemprot air (*water cannon*), penembakan dengan gas air mata, penembakan peluru hampa dan peluru karet dengan tujuan untuk membubarkan kerumunan massa.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Yaacov Trope dkk dari Tel Aviv Univ., Israel (Trope, 2000: 496) tentang penggunaan kontrol diri secara aktif untuk mengatasi godaan/gangguan mengemukakan beberapa hasil penelitiannya. Hasil riset yang pertama yaitu menunjukkan bahwa penghargaan untuk jangka pendek akan mendatangkan strategi kontrol diri untuk dirinya sendiri daripada orang lain. Dan hasil yang kedua yaitu bahwa dukungan kontrol diri membantu seseorang beraksi sesuai dengan interest jangka panjang.

Secara pribadi, anggota polisi juga mempunyai perilaku agresif, sama seperti masyarakat pada umumnya. Namun dalam pelaksanaan tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, polisi dituntut untuk tetap bersikap humanis dan memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik. Bagi anggota dalmas yang baru, dimana mayoritas masih minim pengalaman dan adanya perbedaan antara penanganan aksi unjukrasa saat di SPN (Sekolah Polisi Negara) dengan situasi yang sebenarnya. Berbagai tekanan, bahaya dan tuntutan, fungsi dalmas diperlukan kontrol diri yang baik agar mengurangi perilaku agresif yang ditimbulkannya.

Kontrol diri dikatakan sebagai kemampuan manusia untuk menahan dan mengendalikan perilaku sosial yang tidak pantas (DeWall, Baumeister, Stillman, & Gailliot, 2005). Kontrol diri diperlukan guna membantu individu dalam mengatasi berbagai hal yang merugikan yang mungkin terjadi.

Faktor yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan mengontrol diri seseorang. Hal ini berkaitan dengan faktor kognitif kemasakan kognitif yang terjadi selama masa pra sekolah dan masa kanak - kanak secara bertahap dapat meningkatkan kapasitas individu untuk membuat pertimbangan sosial dan mengontrol perilaku individu tersebut. Sebagian besar anggota dalmas yang menjadi subjek penelitian berusia remaja akhir antara usia 18-23 tahun. Peneliti berasumsi bahwa usia yang relative muda tersebut ada hubungannya terhadap perilaku agresif dilapangan.

Berdasarkan uraian dan fenomena-fenomena di atas, muncul pertanyaan dalam diri peneliti, bagaimana kemampuan kontrol diri anggota dalmas, dan apakah kontrol diri ada hubungannya dengan perilaku agresif anggota polisi dalmas?. Melalui pertanyaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Hubungan antara kontrol diri dengan perilaku agresif pada anggota kompi 4 Subdit Dalmas Polda Metro Jaya.

1.2 . Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan kontrol diri anggota kepolisian di dalam ruang lingkup pelaksanaan tugasnya sebagai seorang polisi subdit dalmas kompi iv.
- b. Kontrol diri berpengaruh besar terhadap perilaku agresif dalam melaksanakan tugas di lapangan.

1.3 . Batasan Masalah

Dalam penelitian tentang “ Hubungan Antara Kontrol diri Dengan Perilaku Agresif anggota Kompi IV Dalmas Dit Sabhara Polda Metro Jaya “, peneliti membatasi masalahnya dengan menjelaskan tentang kemampuan Kontrol diri atau kemampuan mengontrol dan mengatur perilaku, kemampuan mengantisipasi peristiwa, kemampuan menafsirkan peristiwa,

serta kemampuan dalam mengambil keputusan. Peneliti juga membatasi masalah perilaku agresif yang dimiliki anggota dalmas Polda Metro Jaya melalui aspek fisiologis dan verbal. Sedangkan sampel yang akan dijadikan objek penelitian adalah anggota dalmas yang baru lulus dan berdinis dibawah 2 tahun berpangkat bripta yang bertugas menjaga kamtibmas di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya.

1.4 . Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
:”Apakah ada hubungan antara Kontrol diri dengan perilaku agresif anggota Subdit DalmasKompi IV Dit Sabhara Polda Metro Jaya ?”.

1.5 . Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara Kontrol diri dengan perilaku agresif anggota polisi fungsi dalmas kompi iv di wilayah hukum polda metro jaya.

1.6 . Manfaat

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Peningkatan pemahaman terhadap masalah sosial , mengenai hubungan antara Kontrol diri terhadap perilaku agresif pada anggota subdit dalmas Polda Metro Jaya
- b. Memperkaya wawasan pengetahuan mengenai disiplin ilmu psikologi , khususnya psikologi organisasi di lingkungan kepolisian, dan khususnya tentang Kontrol diri dan perilaku agresif pada anggota fungsi dalmas Polda Metro Jaya.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan kepada pimpinan subdit dalmas khususnya dan bagi institusi kepolisian secara keseluruhan, agar dapat meningkatkan kemampuan pengendalian diri bagi anggotanya.

b. Memberikan tambahan informasi bagi Subdit Dalmas mengenai hubungan antara Kontrol diri yang dimiliki anggota fungsi dalmas Polda Metro Jaya dengan perilaku agresif ketika sedang bertugas menghadapi massa.



17